



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI**

KEGIATAN

Masa Reses Tahun Sidang 2021-2022

(12 Juli – 15 Agustus 2022)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

f 19/08/22

DAFTAR ISI

KOMISI III	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	1
KOMISI IV	3
A. FUNGSI LEGISLASI	3
B. FUNGSI ANGGARAN	3
C. FUNGSI PENGAWASAN	3
KOMISI VI	6
A. FUNGSI LEGISLASI	6
B. FUNGSI ANGGARAN	6
C. FUNGSI PENGAWASAN	6
KOMISI VII	8
A. FUNGSI LEGISLASI	8
B. FUNGSI ANGGARAN	8
C. FUNGSI PENGAWASAN	8

KOMISI VIII	9
A. FUNGSI LEGISLASI	9
B. FUNGSI ANGGARAN	9
C. FUNGSI PENGAWASAN	9
KOMISI IX	11
A. FUNGSI LEGISLASI	11
B. FUNGSI ANGGARAN	11
C. FUNGSI PENGAWASAN	11
KOMISI X	13
A. FUNGSI LEGISLASI	13
B. FUNGSI ANGGARAN	13
C. FUNGSI PENGAWASAN	13
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	19
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	30
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	31

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kedutaan Besar RI untuk Republik Portugal 2. <i>Parlemen Portugal Assembly of the Portuguese Republic (Assembleia da República)</i> 3. <i>Commission for the Dissuasion of Drug Addict (Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência – CDT</i> 4. <i>Kepolisian (The Polícia de Segurança Pública (Public Security Police))</i> 5. <i>Kejaksaan (Ministério Público)</i>	Kunjungan Kerja Luar Negeri	1. Komisi III DPR RI melakukan kegiatan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Negara Republik Portugal pada tanggal 10 s.d. 16 Juni 2022. 2. Dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya.	---

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	1. Kepala Kepolsian Daerah 2. Kepala Kejaksaan Tinggi 3. Kepala BNN Provinsi 4. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham 5. Ketua Pengadilan Tinggi 6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama 7. Ketua Pengadilan TUN 8. Ketua Pengadilan Tinggi Militer	Kunker Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022	Kunjungan Kerja Reses Komisi III ke 3 (tiga) daerah, yaitu : a. Provinsi NTB, tanggal 20 sd 24 Juli 2022, dipimpin oleh Ketua Komisi III, Bp Ir Bambang Wuryanto, MBA. b. Provinsi Bengkulu, tanggal 8 sd 12 Agustus 2022, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Bp H. Desmond J Mahesa, SH, MH. c. Provinsi Jambi, tanggal 8 sd 12 Agustus 2022, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Bp Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum, dan Bp Ir. Pangeran Khaerul Saleh, MM.	---

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Reses Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan kegiatan sebagai berikut: - Kunjungan dan diskusi di Lokasi Percontohan “<i>Rice Estate</i>” Lahan Kering (Padi Gogo) Kabupaten Tulang Bawang Barat. - Pertemuan dan diskusi bersama Bupati Tulang Bawang, serta petani dan pembudidaya ikan di Gedung Serba Guna Menggala. - Meninjau dan berdiskusi mengenai Hasil Inovasi dan Produksi Bibit Produktif di Taman Sains Pertanian/Kebun Percobaan Tegineneg,	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung. - Pertemuan dan diskusi mengenai Pengelolaan Kawasan Konservasi serta Penyerahan Vaksin PMK di Kantor Gubernur Lampung.	
			Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan kegiatan sebagai berikut: - Meninjau dan berdiskusi mengenai Pelaksanaan Program Food Estate, bertempat di Desa Umbu Pabal Selatan, Kec. Umbu Ratu Nggay, Kab. Sumba Tengah. - Berdiskusi mengenai Perdagangan Ilegal Satwa Jenis Burung Dilindungi serta Pemulihan Ekosistem dan Kawasan Hutan di Pulau Sumba, bertempat di Kawasan Hutan Lidung Poronumbu/Desa Kareka Nduku Selatan, Kec. Tanarighu, Kab. Sumba Barat. - Meninjau dan berdiskusi mengenai Penanganan Wabah Hama Belalang, bertempat di Desa Hameli Ate, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			- Berdiskusi mengenai <i>Destructive Fishing</i> di Pulau Sumba, bertempat di Desa Radamata, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya.	
			Kunjungan Kerja Reses ke Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kegiatan sebagai berikut: - Diskusi mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Vale Indonesia Tbk, bertempat di Hotel Santika Palu. - Kunjungan serta diskusi mengenai Perizinan, Penangkapan Ikan Terukur dan Ketersediaan Stok BBM bagi Nelayan di UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, Labuan Bajo, Kabupaten Donggala. - Kunjungan dan diskusi mengenai Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Hewan Ternak dan Ketahanan Pangan di Balai Karantina Pertanian Palu, Kota Palu.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peninjauan ke Manggarai Barat, NTT. Dalam rangka pengembangan infrastruktur, pariwisata nasional, layanan informasi, komunikasi dan pembangunan digitalisasi serta dalam rangka peningkatan pelayanan jasa dan barang serta pariwisata nasional khususnya di NTT. b. Provinsi Kalimantan Utara Peninjauan ke Tarakan. Dalam rangka mendukung pembangunan digitalisasi, layanan informasi dan komunikasi, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro dan ultra mikro.	

Masa Reses Tahun Sidang 2021-2022
(12 Juli – 15 Agustus 2022)

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			c. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peninjauan ke Banda Aceh. Dalam rangka pengembangan sistem kelistrikan, regasifikasi, pengolahan gas dan sumber migas baru serta Dalam rangka pemenuhan kebutuhan komoditas nasional, infrastruktur dan peningkatan konektivitas jalan tol.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Raker Menteri ESDM RI dengan menghadirkan Direktur Utama PT PLN (Persero)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. <i>Progress</i> realisasi entitas khusus batubara. <i>Progress</i> BLU batubara b. Strategi dan kebijakan pemenuhan DMO batubara khususnya untuk PT PLN (Persero).	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Reses ke Solo (Prov Jateng), Bondowoso (Prov. Jatim) dan Gianyar (Bali)	a. Kebijakan mengenai implementasi fungsi agama dan pendidikan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama RI; b. Implementasi bantuan sosial seperti PKH, Kartu Sembako dan BST di lingkungan Kementerian Sosial RI; c. Pengawasan terhadap perlindungan perempuan dan perlindungan anak di	1. Memastikan pelaksanaan program moderasi beragama sebagai program prioritas nasional Kementerian Agama dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan. Selain itu fungsi pendidikan keagamaan juga harus dapat dioptimalkan untuk mendorong daya saing madrasah dan pesantren dibandingkan dengan pendidikan umum. 2. Memastikan program dan anggaran untuk penyaluran bantuan sosial dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila ada kendala di lapangan dapat diatasi sesegera	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		bawah koordinasi Kementerian PPPA RI; d. Kesiapsiagaan bencana di berbagai daerah rawan bencana di Indonesia yang dikomandoi oleh BNPB.	mungkin sehingga mencegah terjadinya <i>inclusion error</i> (kesalahan memasukan orang yang tidak berhak menerima) dan <i>exclusion error</i> (atau kesalahan karena tidak memasukan orang yang berhak menerima). 3. Memastikan pelaksanaan program dan anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilakukan secara optimal, khususnya di era pandemi Covid-19 ketika angka kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat. 4. Memastikan pelaksanaan program mitigasi dan pencegahan bencana dapat dilakukan lebih dini untuk meminimalisir jumlah korban jiwa dan harta akibat bencana khususnya di daerah-daerah rawan bencana.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Reses Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Papua dengan kegiatan sebagai berikut: - Pertemuan dan diskusi bersama Gubernur Papua yang di wakili oleh Sekda Papua beserta jajaran. - Meninjau dan diskusi dengan Direksi Rumah Sakit Dok2 Jayapura. - Meninjau dan berdiskusi dengan Pimpinan BLK Jayapura.	
			Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Sambas, dengan kegiatan sebagai berikut: - Pertemuan dan diskusi dengan Bupati Sambas beserta jajaran. - Meninjau dan berdiskusi mengenai Pekerja Migran Indonesia dengan BP2MI.	

Masa Reses Tahun Sidang 2021-2022
(12 Juli – 15 Agustus 2022)

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Batam, dengan kegiatan sebagai berikut: - Pertemuan dan diskusi dengan Gubernur Batam diwakili oleh Sekda Batam, beserta jajaran. - Meninjau dan berdiskusi dengan Direksi RSUD. - Meninjau dan berdiskusi dengan pimpinan BLK Batam.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	▪ Kemendikbudristek RI ▪ Kemenparekraf/Baparekraf RI ▪ Kemenpora RI ▪ Perpunas RI	12-16 Juli 2022 Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Jawa Tengah: 1. Kabupaten Demak 2. Kota Salatiga 3. Kabupaten Kendal	Rekomendasi Kunjungan Kerja ke Kabupaten Demak: 1. Mendesak kepada Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa program dan kegiatannya, seperti BOS, PPDB, DAK dan implementasi kurikulum merdeka. Khusus mengenai kurikulum merdeka, tim kunjungan kerja merekomendasikan agar Kemendikbudristek RI tidak memaksakan implementasi kurikulum merdeka kepada satuan pendidikan. 2. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk membangun Sekolah Luar Biasa, mengingat di Kabupaten Demak, saat	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			ini hanya terdapat 1 (satu) Sekolah Luar Biasa Negeri. 3. Mendorong Kemenpora RI untuk mempertimbangkan usulan Pemda Kabupaten Demak untuk membangun <i>sport centre</i>. 4. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI dan Kemendikbudristek RI untuk mendukung rencana pembangunan Museum Islam Demak di Kabupaten Demak. 5. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI berkoordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membantu menyelesaikan permasalahan parkir di sekitar destinasi wisata religi. Rekomendasi Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kendal: 1. Komisi X DPR RI mendorong Kemedikbudristek RI, Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Kendal untuk memperhatikan dan menindaklanjuti masukan dan usulan bidang pendidikan sebagaimana telah tercantum dalam kesimpulan, antara lain: a) memberikan pendampingan ke satuan pendidikan terkait penggunaan	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			aplikasi rencana dan anggaran sekolah (ARKAS), karena Bendahara BOS belum memahami penyusunan Rencana Penggunaan Dana/Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RPD/RKAS). Hal ini berakibat penggunaan dana BOS tidak optimal. b) meninjau kembali kebijakan PPDB yang dilaksanakan secara daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>) sehingga mempersempit ruang bagi sekolah swasta untuk menjaring siswa baru. Kondisi ini merugikan penyelenggara pendidikan swasta. c) memperbaiki koordinasi antar K/L dan Pemda, terkait pelaksanaan rekrutmen Guru PPPK, terutama mengenai keakuratan dapodik yang digunakan sebagai data primer dalam proses rekrutmen. d) mendorong LLDIKTI untuk meningkatkan pengelolaan pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) sehingga dapat menyajikan data pendidikan tinggi yang akurat dan terhubung dengan program yang sedang diikuti mahasiswa dan dosen. 2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/ Baparekraf RI untuk	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal melalui program dan kegiatan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM Pariwisata/Ekraf serta program terkait Desa Wisata, Pokdaswis dan Himpunan Pramuwisata. 3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal melalui program dan kegiatan pembinaan olahraga prestasi dan program kepemudaan khususnya pengembangan kewirausahaan pemuda, karena program ini mendapat perhatian dan minat yang tinggi. 4. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal melalui program perpustakaan dan literasi guna meningkatkan dan optimalisasi penggunaan gedung layanan perpustakaan yang baru selesai dibangun. Rekomendasi Kunjungan Kerja Ke Kota Salatiga: 1. Komisi X DPR RI mendorong Kemedikbudristek RI, Pemprov Jawa	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Tengah dan Pemkot Salatiga untuk memperhatikan dan menindaklanjuti masukan dan usulan bidang pendidikan (sebagaimana kesimpulan), antara lain: a) perbaikan pengelolaan dan peningkatan PIP, BOS DAK, dan evaluasi zonasi PPDB di Kota Salatiga melalui perbaikan regulasi, petunjuk teknis, manajemen dan pelaksanaannya. b) perbaikan aplikasi ARKAS dan MARKAS, karena terdapat kendala yang mengakibatkan data sekolah terkunci dan dana sekolah tidak dapat dimanfaatkan dan harus dikembalikan. c) mendorong Pemerintah agar SMA dan SMK dapat menerima program inklusi, sehingga pendidikan menengah juga dapat mengembangkan pendidikan inklusi. d) mempertimbangkan adanya DAK non-fisik untuk guru pendamping anak berkebutuhan khusus (<i>shadow teacher</i>). e) memperhatikan usulan pengangkatan Pustakawan sebagai	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Tenaga Kependidikan menjadi PPPK/ASN dengan berpedoman pada Dapodik dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan. 2. Dibidang Pendidikan Tinggi, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk memperhatikan usulan dari Yayasan Bhakti Semesta, diantaranya bantuan pendanaan untuk beasiswa atau biaya kuliah bagi mahasiswa. 3. Dibidang Parekraf, Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah, khususnya BAPPENAS RI dan Kemenparekraf RI, untuk mendukung diadakannya kembali DAK Bidang Pariwisata untuk Pemkot Salatiga, khususnya untuk mendukung kelanjutan pembangunan Taman Wisata Budaya Salatiga. 4. Komisi X DPR RI mendorong Pemkot Salatiga untuk berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemprov Jawa tengah, dan pemangku kepentingan olahraga lainnya dalam upaya membangun <i>Sport Center</i>.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSI BKSAP	<i>Joint Mission of the Task Force to Ukraine and the Russian Federation</i> (Polandia, Kyiv and Moscow). (8 – 13 Juli 2022)	Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon industr dengan <i>Inter-Parliamentary Union</i> (IPU) <i>Task Force</i> untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina berkunjung ke Polandia, Ukraina, dan Rusia dan menggelar dialog dengan Ketua Parlemen ketiga negara tersebut serta pihak pihak terkait demi perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Sebagai anggota IPU <i>Task Force</i> mewakili industr Asia Pasifik, Fadli Zon menyampaikan keprihatinan atas dampak perang yang terjadi di ketiga negara tersebut. Disampaikan Fadli, melalui kunjungan ini, IPU <i>Task Force</i> membawa misi untuk membuka kran dialog demi mengakhiri konflik. Pertemuan dengan Parlemen Polandia IPU <i>Task Force</i> menegaskan kembali misinya untuk menjadi jembatan bagi konflik kedua negara. Tujuannya adalah segera mengakhiri perang dan membawa dua pihak yaitu Rusia dan Ukraina ke meja perundingan. Dalam hal ini, IPU konsisten menekankan diplomasi antar parlemen sebagai salah satu solusi untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Dalam kesempatan itu, Ketua BKSAP sekaligus Anggota <i>Task Force</i> perwakilan dari Asia Pasifik Fadli Zon menyampaikan pentingnya membuka diri untuk dialog untuk menghentikan perang demi menghindari lebih banyak kerusakan dan korban jiwa. Menurutnya, perundingan mesti segera direalisasikan. Polandia merupakan akses utama melalui jalur darat menuju Ukraina. Selama perang berlangsung, Polandia menampung sekitar 3 juta pengungsi Ukraina. Pemerintah Polandia menyediakan berbagai layanan industri bagi para pengungsi mulai dari tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan dan industri lain. Pertemuan dengan Parlemen Ukraina (Verkhovna Rada) Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, industri dengan <i>Inter-Parliamentary Union (IPU) Task Force</i> menggelar dialog dengan Ketua Parlemen Ukraina (Verkhovna Rada), Ruslan Stefanchuk, di <i>Conference Hall</i>, Gedung Parlemen Ukraina. Selain dengan pimpinan parlemen Ukraina, delegasi juga berdiskusi dengan delegasi IPU Parlemen Ukraina. (11/07/2022). Dalam kunjungan ke Kyiv ini, <i>IPU Task Force</i> membawa misi untuk membuka kran dialog	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			demi mengakhiri konflik. IPU <i>Task Force</i> juga menyampaikan komitmen untuk menjadi jembatan dialog antara Rusia dan Ukraina dalam mencari solusi damai melalui diplomasi parlemen. Secara konkret IPU <i>Task Force</i> juga meminta Verkhovna Rada Parlemen Ukraina bersedia membuka dialog dengan pihak parlemen Rusia. Meskipun tak mudah, jalan dialog dan diplomasi harus tetap terbuka sebagai pintu jalan keluar. Delegasi IPU <i>Task Force</i> mengunjungi <i>Dmytrivka Village</i> dimana terdapat banyak tank yang ditinggal tentara Rusia. Delegasi juga melihat langsung wilayah Bucha dan Irpin, kota kecil di utara Kyiv yang terdampak perang cukup parah berupa kerusakan bangunan tempat tinggal, pusat bisnis, dan sejumlah fasilitas industri. Kedatangan delegasi IPU <i>Task Force</i> disambut langsung oleh Walikota Bucha dan Walikota Irpin. Kunjungan ke Kyiv dilakukan melalui jalur darat dari Polandia yaitu dengan kendaraan roda empat dari Warsawa ke Stasiun Chelm, kota kecil di Tenggara Polandia yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Dari Chelm	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			perjalanan dilanjutkan menggunakan kereta api selama 15 jam menuju Kyiv. Pertemuan dengan Parlemen Rusia (<i>State Duma & Senate</i>) Acara utama adalah dialog dengan Parlemen Rusia untuk mengupayakan perdamaian dengan Ukraina. Pertemuan dengan <i>State Duma</i> (DPR) dan <i>Federation Council</i> (Senate) Parlemen Rusia dilakukan Kamis, 14 Juli 2022. Delegasi IPU juga berdialog dengan Wakil Ketua <i>Federation Council</i> atau Senat, <i>Konstantin Kosachev</i> dan beberapa pimpinan parlemen Rusia. IPU secara konsisten menegaskan bahwa diplomasi parlemen diperlukan untuk mendukung memberikan kontribusi demi terciptanya resolusi perdamaian yang berkelanjutan. Pada dua pertemuan tersebut, Ketua BKSAP DPR RI yang juga anggota IPU <i>Task Force</i> dari Kawasan Asia Pasifik menyampaikan pentingnya dialog dan diplomasi. Semua perang dan konflik berujung pada dialog dan negosiasi. Diplomasi parlemen sebagai <i>second-track diplomacy</i> mendukung penyelesaian berbagai permasalahan dunia termasuk konflik Rusia-Ukraina.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	KSI BKSAP	Pimpinan BKSAP DPR RI menghadiri <i>High Level Political Forum on Sustainable Development</i> (HLPF) di New York, Amerika Serikat. (13 Juli 2022)	Delegasi DPR RI yang diwakili Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menghadiri <i>High Level Political Forum on Sustainable Development</i> (HLPF) di New York, Amerika Serikat, Rabu (13/7). “Kami sangat serius untuk merealisasikan SDGs. Secara eksplisit perundang-undangan, aturan, dan regulasi nasional kami mencantumkan urgensi pencapaian SDGs,” tegas Putu Supadma Rudana, Ketua Delegasi DPR, saat membuka komentarnya di pertemuan yang dihelat <i>Inter-Parliamentary Union</i> (IPU). Lebih lanjut, Putu yang juga didampingi dua Pimpinan BKSAP lainnya yaitu Mardani Ali Sera dan Achmad Hafisz Tohir tersebut menyampaikan peran Presidensi Indonesia di G20. Disampaikan dia ihwal urgensi kerja sama multilateral sebagai sarana yang efektif untuk mendapatkan daya ndus dan kemajuan dalam mencapai SDGs. Selain mengenai reformasi perpajakan, Putu juga menekankan bahwa perjanjian internasional memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan global yang lebih adil bagi negara-negara dengan basis pasar yang sangat besar bagi perusahaan digital internasional seperti Indonesia.	13 Juli 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Di sela-sela forum itu, Pimpinan BKSAP DPR RI bertemu dengan Delegasi Parlemen Kanada untuk menjajaki kerja sama teknologi hijau yang dapat mengurangi dampak emisi gas rumah kaca, dan kerja sama di industri halal.	
3.	KSB BKSAP	Rapat Virtual GKSB DPR RI – Parlemen Oman dengan Direktur Timur Tengah Kemlu RI. (13 Juli 2022)	GKSB DPR RI – Parlemen Oman mengadakan Rapat Koordinasi dengan Direktur Timur Tengah Kemlu RI untuk membahas rencana program kerja GKSB DPR RI – Parlemen Oman dan mendapatkan perkembangan isu terkini antara Indonesia – Oman (14/07/2022). Terkait hubungan bilateral antara Indonesia dan Oman, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain di bidang pendidikan, kerja sama pariwisata, transportasi dan peningkatan kerja sama perdagangan. Di bidang pendidikan, diharapkan agar segera disetujuinya nota kesepahaman terkait pendidikan tinggi, sehingga nantinya pendidikan pertukaran pelajar maupun pertukaran dosen antara kedua negara. Dalam bidang perdagangan, banyak peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengeksport barang-barang kebutuhan masyarakat Oman. Peluang kerjasama di bidang pariwisata juga sangat terbuka, mengingat letak geografis Oman yang sangat dekat dengan Saudi Arabia,	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			sehingga dapat dimanfaatkan untuk kunjungan wisata selain umroh. Setelah andemic, diharapkan wisatawan Oman juga akan banyak berkunjung ke Indonesia dengan adanya <i>direct flight</i> Oman Air ke Indonesia. GKSB DPR RI – Parlemen Oman juga berencana untuk melakukan kunjungan guna meningkatkan potensi kerja sama di berbagai bidang termasuk kerja sama antar parlemen. Rapat dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Oman, Prof. Dr. Zainuddin Maliki (F-PAN) dan dihadiri oleh anggota GKSB DPR RI – Parlemen Oman, Ishak Mekki (F-PD) dan Dr. Al Muzzamil Yusuf (F-PKS) serta Direktur Timur Tengah Kemlu RI, Bagus Hendraning Kobarsyih.	
4.	ABA - BKSAP	BKSAP P20 Day di Tasikmalaya, Jawa Barat. (20 Juli 2022)	Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar kegiatan Sosialisasi Diplomasi Parlemen bertema “<i>Urgensi SDGs dan Momentum Parliamentary Speakers Summit P20 Indonesia 2022 dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya</i>” di Kantor Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (20/7/2022). Dalam paparannya, Ketua BKSAP Fadli Zon mendorong agar target pembangunan di Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya dapat selaras	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dengan kerangka kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>). “Misalnya tujuan nomor satu dan dua adalah nol kemiskinan dan kelaparan,” kata Fadli. Sehingga, upaya untuk menghadirkan <i>zero poverty and hunger</i> tersebut dapat dimulai dari salah satu sektor yang dominan di Tasikmalaya, yaitu pertanian. Diketahui, struktur perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh empat kategori lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; serta industri pengolahan. Keempat sektor usaha ini menyumbang sebesar 70 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera (F-PKS), Putu Supadma Rudana (F-Demokrat), dan Hafisz Thohir (F-PAN); serta Anggota BKSAP Kamrussamad (F-Gerindra) dan Muslim (F-Demokrat). Kemudian, Ketua DPRD Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Sekda Kabupaten Tasikmalaya, civitas akademika beberapa perguruan tinggi dan jajaran Forkopimda Tasikmalaya.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	KSI - BKSAP	<i>73rd Meeting of the Committee on Middle East Questions</i> (virtual). (28 Juli 2022)	Wakil Ketua BKSAP Dr. Mardani Ali Sera mengikuti pertemuan ke-73 <i>Committee on Middle East Questions</i> (Komisi Urusan Timur Tengah) <i>Inter-Parliamentary Union</i> (IPU), Kamis (28/7/2022). Acara yang dihelat secara virtual tersebut membahas perkembangan situasi terkini di Palestina, Yaman, dan Libya. Dr. Mardani juga menekankan bahwa sebagai penyokong sejak lama terhadap perjuangan Palestina, Indonesia akan terus berkomitmen untuk sepenuhnya mendukung UNRWA (badan di PBB yang menangani pengungsi Palestina), dan bekerja sama untuk menangani para pengungsi dengan lebih baik. Diingatkan pula agar UNRWA tetap menjaga netralitas dan berbasis kemanusiaan.	
6.	KSB - BKSAP	Pertemuan Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Georgia dengan Dubes Georgia untuk Indonesia. (2 Agustus 2022)	Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Georgia, Adian Y. Napitupulu (F-PDIP) menerima Duta Besar Georgia untuk Indonesia, H.E. Mr. Irakli Asashvili di Desa Wisata Situ Lebak Wangi. (02/08/2022). Pertemuan membahas beberapa langkah penguatan hubungan kerja sama antara Indonesia - Georgia, khususnya di bidang perdagangan, bisnis, energi, pertahanan serta hubungan antar-parlemen. Georgia adalah negara dengan yang terletak di antara Eropa	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Timur dan Asia Barat dan berbatasan langsung dengan Laut Hitam. Kondisi geografis tersebut memberikan keuntungan strategis bagi Georgia yang berperan menjadi gerbang bagi berbagai komoditas energi dan pangan untuk negara - negara tetangga. Georgia juga dikenal sebagai negara yang memiliki indeks kemudahan berbisnis yang baik, kedua hal tersebut dapat menjadi modalitas untuk penguatan hubungan dagang antara Indonesia dan Georgia. Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Georgia mengapresiasi kehadiran Duta Besar Georgia untuk Indonesia di Desa Wisata Situ Lebak Wangi serta menyambut baik berbagai rencana kerja sama bilateral antara Indonesia dan Georgia. Ada berbagai hal dimana Indonesia dan Georgia dapat saling berbagi pengalaman, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan peningkatan indeks kemudahan berbisnis. Kedua negara juga tertarik dalam meningkatkan perdagangan khususnya dalam komoditas energi. Terkait dengan kerja sama antar parlemen, kedua pihak sepakat bahwa saling kunjung antar kedua parlemen dapat menjadi salah satu upaya untuk peningkatan hubungan kedua parlemen.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Duta Besar menyampaikan bahwa di Parlemen Georgia juga telah dibentuk <i>Friendship Group</i> dengan Indonesia dan akan dengan senang hati menerima apabila GKSB DPR RI - Parlemen Georgia berkunjung ke sana. Ketua GKSB menyampaikan bahwa DPR RI juga terbuka untuk menerima kunjungan dari <i>Friendship Group</i> Georgia sebagai upaya peningkatan hubungan kerja sama kedua parlemen serta kerja sama di berbagai bidang lainnya.	
7.	KSB – BKSAP	Pertemuan/ <i>Courtesy Call</i> antara Dubes Iran dengan GKSB DPR RI – Parlemen Iran. (15 Agustus 2022)		

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Pengawasan pelayanan program Jamkestama yang dilaksanakan rumah sakit provider Asuransi Jasindo ke: 1. Jayapura, Papua, 8-11 Agustus 2022. 2. Medan, Sumatera Utara, 12-15 Agustus 2022.	Peninjauan rumah sakit provider Asuransi Jasindo dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, hasil peninjauan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi BURT terhadap pelayanan program Jamkestama.	

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)

NO	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Audiensi DPRD	Mahkamah Kehormatan Dewan menerima kedatangan kunjungan kerja DPRD ; - Tanggal 13 Juli 2022, Menerima Audiensi DPRD Kabupaten Solok dan DPRD Kota Salatiga; - Tanggal 15 Juli 2022, Menerima Audiensi DPRD Provinsi Riau; - Tanggal 4 Agustus 2022, Menerima Audiensi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.	
